

Tantangan dan Peluang Perbankan Syariah dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015

Hamdi Agustin¹, Armis²

INFO ARTIKEL

Penulis:

¹Universitas Islam Riau

*E-mail: hamdiagustin@eco.uir.ac.id

Untuk mengutip artikel ini:

Agustin H dan Armis, 2015, Tantangan dan Peluang Perbankan Syariah dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Vol. 26, No. 2, Hal. 38-42.

Akses online:

<https://journal.uir.ac.id/index.php/kiat>

E-mail:

kiat@jurnal.uir.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui peluang dan tantangan perbankan syariah di Indonesia dalam persaingan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015. Peluang dan tantangan perbankan syariah di ASEAN dapat diselesaikan dengan kerjasama dan bersatu tidak menjadi pesaing di antara perbankan syariah, perbankan syariah dengan upaya keras Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Mengingat peluang yang sangat besar untuk mengembangkan perbankan syariah Indonesia dan juga untuk menghadapi tantangan penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), perbankan syariah Indonesia harus mampu menjadi fasilitator perbankan syariah di ASEAN dapat bekerja sama dan bersatu dalam menjalankan berbagai strategi pembangunan.

The purpose of this paper is to investigate the opportunities and challenges of Islamic banking in Indonesia in the competition ASEAN Economic Community (AEC) by 2015. The opportunities and challenges of Islamic banking in ASEAN can be solved by cooperation and united not become competitors among Islamic banks with the hard efforts of the Islamic banking Indonesia in the ASEAN Economic Community (AEC). Given the enormous opportunities for developing Islamic banking in Indonesia and also to face the challenges for the implementation of the ASEAN Economic Community (AEC), the Indonesian Islamic banking should be able to be facilitators of Islamic banking in ASEAN can work together and unite in carrying out various development strategies.

Katakunci: Tantangan, Peluang, Perbankan Syariah, MEA

1. Pendahuluan

Secara umum tujuan dibentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah untuk menciptakan kawasan ekonomi ASEAN yang makmur dan berdaya saing tinggi. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) diharapkan mampu meningkatkan pembangunan ekonomi yang merata dan mengurangi perbedaan sosial di negara-negara kawasan ASEAN, termasuk juga dalam menghadapi kekuatan perekonomian yang lebih global (Tedjasuksmana, 2014).

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) membuka peluang bagi sejumlah sektor ekonomi di kawasan Asia Tenggara untuk mendapatkan *market size* yang lebih luas serta peluang investasi yang semakin besar. Implikasi pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menjadikan perekonomian suatu negara sepenuhnya terintegrasi ke dalam ekonomi global untuk bersiap menghadapi pasar bebas di bidang permodalan, barang dan jasa, investasi serta tenaga kerja. Hadirnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang merupakan pasar denganskala global tentu akan berakibat munculnya persaingan antar negara-negara ASEAN. Negara-negara ASEAN dituntut untuk saling bersaing dengan memanfaatkan peluang yang ada (Dhika, 2014).

Persaingan antar negara ASEAN tentu menjadi tantangan bagi masing-masing negara, tidak terkecuali bagi negara Indonesia. Indonesia yang merupakan salah satu anggota negara ASEAN dituntut agar dapat bersaing dengan sembilan negara ASEAN lainnya yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Setiap negara

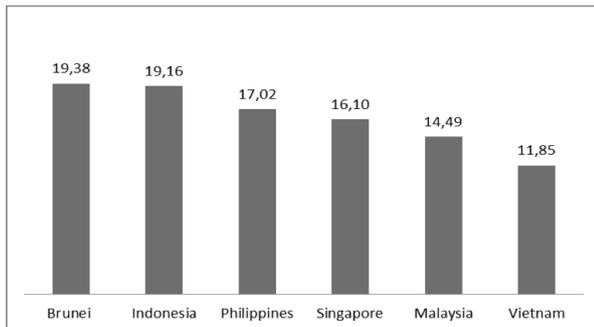
ASEAN memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan persaingan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Indonesia yang mayoritas berpenduduk kaum muslim, sudah selangkah menjadi pelopor perkembangan perekonomian dalam sektor keuangan syariah (Alamsyah, 2012).

Sektor keuangan syariah yang tertumpu pada perbankan syariah menunjukkan bahwa jumlah aset bank syariah Indonesia masih dibawah Malaysia untuk Negara ASEAN, walaupun lebih tinggi dari Negara lain di ASEAN (tabel 1). Ini menunjukkan bahwa bank syariah di Indonesia dapat bekerjasama dengan Negara ASEAN untuk dapat melakukan kegiatan perbankan yang lebih maju.

Tabel 1. Urutan Negara Berdasarkan Aset Syariah

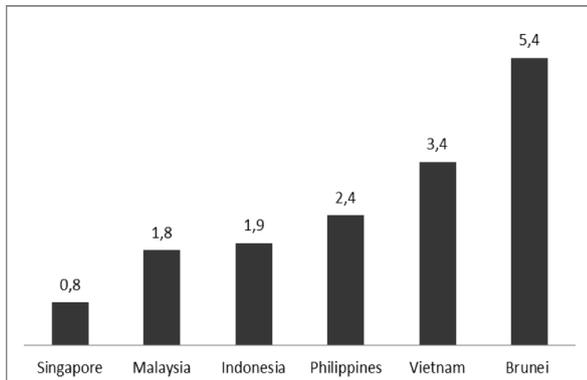
Rank	Country	Shari'ah-Compliant Assets \$m	Rank	Country	Shari'ah-Compliant Assets \$m
1	Iran	293.165,8	1	Iran	314.897,4
2	Saudi Arabia	127.896,1	2	Saudi Arabia	138.238,5
3	Malaysia	86.288,2	3	Malaysia	102.639,4
4	UAE	84.036,5	4	UAE	85.622,6
5	Kuwait	67.630,2	5	Kuwait	69.088,8
6	Bahrain	46.159,4	6	Bahrain	44.858,3
7	Qatar	27.515,4	7	Qatar	34.676,0
8	UK	19.410,5	8	Turkey	22.561,3
9	Turkey	17.827,5	9	UK	18.949,0
10	Bangladesh	7453,3	10	Bangladesh	9.365,5
11	Sudan	7151,1	11	Sudan	9.259,8
12	Egypt	6299,7	12	Egypt	7.227,7
13	Pakistan	5126,1	13	Indonesia	7.222,2
14	Jordan	4621,6	14	Pakistan	6.203,1
15	Syria	3838,8	15	Syria	5.527,7
16	Iraq	3815	16	Jordan	5.042,4
17	Indonesia	3388,2	17	Brunei	3.314,7
18	Brunei	3201,4	18	Yemen	2.338,7
19	Yemen	1318,3	19	Thailand	1.360,8
20	Switzerland	1040,6	20	Algeria	1.051,1
21	Mauritius	943,5	21	Mauritius	992,2
22	Algeria	837,5	22	Switzerland	935,5
23	Tunisia	632,3	23	Tunisia	770,1
24	Singapore	618	24	Singapore	725,0
25	Thailand	495,5	25	Palestine	612,5

Sumber: Maris Strategies & the Banker (2010)



Gambar 1. Rasio Kecukupan Modal bank di ASEAN
 Sumber data: IMF, data terakhir

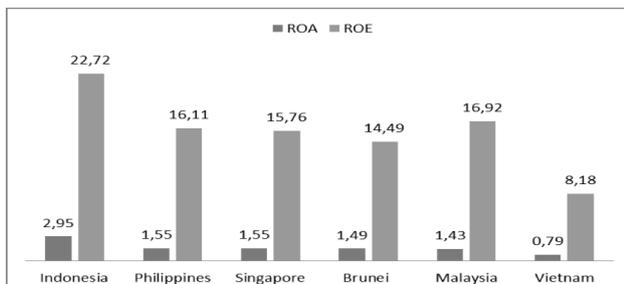
Dari Gambar 1 menunjukkan bahwa ketahanan bank yang dilihat dari rasio kecukupan modal sebesar 19,16% diatas dari Negara ASEAN kecuali Brunai. Ini menunjukkan bahwa modal perbankan di Indonesia masih dapat untuk menambah pemberian pinjaman kepada sektor usaha.



Gambar 2. Non Performing Loan Perbankan (NPL) di ASEAN

Sumber data: IMF, data terakhir

Berdasarkan Gambar 2 menunjukkan NPL perbankan di Indonesia masih rendah dari Negara ASEAN yang menunjukkan bahwa kredit yang disalurkan dapat dibayar oleh nasabah.



Gambar 3. ROA dan ROE Perbankan di ASEAN

Sumber data: IMF, data terakhir

Berdasarkan Gambar 3 menunjukan bahwa tingkat keuntungan dari perbankan di Indonesia cukup tinggi yang melebihi dari seluruh Negara ASEAN. Ini menunjukkan bahwa sektor perbankan di Indonesia mempunyai keuntungan yang tinggi dan merupakan sektor usaha yang menguntungkan.

Sementara itu, data yang diolah oleh Statistik Perbankan Syariah (2012), menjelaskan bahwa komposisi pembiayaan bank syariah terhadap akad mudharabahnya mengalami peningkatan signifikansi, tahun 2006 sebesar 4,062 triliun menjadi 6,597 triliun. Pada tahun 2011 semakin naik menjadi 10,229 triliun, dan ditutup dengan angka

11,359 triliun pada September 2012. Begitu juga pada akad Musyarakahnya terus mengalami peningkatan, dari tahun 2006 sebesar 2,335 triliun naik 24,481 triliun pada September tahun 2012. Sementara pada akad murabahanya tahun 2006 sebesar 12,624, tahun 2009 adalah 26,321 triliun. Pada tahun 2011 mengalami peningkatan, yaitu sebesar 56,365 triliun dan ditutup pada September 2012 sebesar 77,153 triliun.

Data di atas menunjukkan bahwa peran perbankan syariah mempunyai andil dan peran penting dalam pengembangan ekonomi secara nasional. Peningkatan pembiayaan perbankan syariah melalui resapan bagi UKM dan Usaha besar terus berkembang. Begitu juga dengan aspek komposisi sistem dalam perbankan syariah mengalami rating yang sangat bagus dari tahun ke tahun. Sehingga total pada tahun 2012 dalam komposisi pembiayaan akad dalam sistem perbankan syariah mengalami kenaikan yang cukup bagus, yaitu 130,357 triliun, dari 20,444 triliun pada tahun 2006 (Hayat, 2014).

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, adapun rumusan masalah yang akan dikaji oleh peneliti adalah bagaimana peluang dan tantangan perbankan syariah di Indonesia dalam menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 ?

Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka pemaparan ini bertujuan untuk mengetahui peluang dan tantangan perbankan syariah di Indonesia dalam menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.

2. Metode Penulisan

Pemaparan ini merupakan jenis artikel konseptual. Artikel konseptual atau biasa disebut artikel nonpenelitian merupakan hasil pemikiran penulis atas suatu permasalahan yang dituangkan dalam bentuk tulisan (Alam, 2015). Metode penulisan yang digunakan untuk pemaparan artikel konseptual ini yaitu dengan metode dokumentasi.

Metode dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2014). Sumber-sumber yang digunakan dalam penulisan artikel konseptual ini yaitu artikel-artikel konseptual yang relevan, hasil penelitian terdahulu, peraturan, kebijakan-kebijakan, serta teori-teori dari berbagai buku teks.

3. Pembahasan

3.1 Tantangan Bank syariah menghadapi MEA

Tantangan perbankan syariah dalam jangka pendek adalah sebagai berikut: (1) pemenuhan gap sumber daya insani; (2) inovasi pengembangan produk dan layanan perbankan yang kompetitif serta berbasis atas kebutuhan masyarakat; dan (3) keberlangsungan sosialisasi dan edukasi. Sementara jangka panjangnya, antara lain: (1) dibutuhkan kerangka hukum yang dapat dijadikan sandaran dalam penyelesaian masalah keuangan syariah secara komprehensif; (2) adanya kodifikasi produk dan standar regulasi secara nasional dan global sebagai jembatan dalam perbedaan terhadap fiqh muāmmalah; dan (3) diperlukannya nilai imbal hasil (*rate of return*) bagi keuangan syariah (Alamsyah, 2012).

Sementara itu, Tantangan perbankan syariah dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang mendapat perhatian serius adalah upaya untuk memenuhi gap Sumber Daya Insani (SDI) dari tenaga kerja domestik agar tidak diisi oleh tenaga kerja asing. Salah satu kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yaitu *freedom of movement for skilled and talented labours* (Takidah, 2014). Keberadaan tenaga kerja adalah faktor penting dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) terutama dalam perkembangan perbankan syariah Indonesia. Tenaga kerja merupakan pengendali barang, jasa, investasi maupun modal. Indonesia jika dilihat dari GDP yang dapat digunakan sebagai tolak ukur atas kuantitas tenaga kerja, tentu Indonesia masih kalah dengan negara Singapura, Malaysia dan Thailand.

Kebutuhan akan SDI (Sumber Daya Insani) dengan jumlah besar tidak diimbangi dengan tingginya jumlah tenaga kerja yang berbasis syariah. Di Indonesia para sarjana ekonomi islam masih sangat sedikit, sehingga perbankan syariah Indonesia masih sangat membutuhkan tenaga kerja profesional untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Tantangan ketersediaan Sumber Daya Insani (SDI) perbankan syariah Indonesia bukan hanya pemenuhan dari segi kuantitas terlebih dari segi kualitas juga harus diperhatikan. Sumber Daya Insani (SDI) perbankan syariah Indonesia dituntut untuk memiliki penguasaan *operasional banking*, namun juga harus memperhatikan kualitas Sumber Daya Insani (SDI) dari aspek syariah.

Tantangan selanjutnya yaitu adanya kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yaitu kebebasan dalam pertukaran barang, jasa, modal, dan investasi. Kebebasan dalam pertukaran produk tersebut diharapkan tidak membawa dampak buruk bagi perbankan syariah Indonesia (Puja, 2012). Kekurangan produk yang dimiliki perbankan syariah Indonesia diharapkan agar tidak dikuasi oleh negara-negara ASEAN yang lain. Kekhawatiran tersebut mengarah pada kondisi pasar keuangan dan perbankan syariah Indonesia yang belum tentu sesuai dengan produk dari negara lain. Produk perbankan syariah Indonesia masih membutuhkan banyak inovasi pengembangan produk dan layanan perbankan yang

kompetitif yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat.

Pengembangan produk dan layanan perbankan syariah Indonesia harus menciptakan produk dan layanan yang mengedepankan keunikan dari prinsip syariah dan kebutuhan dari masyarakat, terlebih dalam menghadapi persaingan pasar global Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Untuk itu, diperlukan praktisi-praktisi perbankan syariah untuk menciptakan inovasi produk yang dapat menunjang pengembangan perbankan syariah Indonesia dalam menghadapi gencarnya arus perekonomian Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Tantangan yang juga memberikan pengaruh terhadap pengembangan perbankan syariah Indonesia adalah keinginan untuk menjalankan program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat luas. Kegiatan sosialisasi dan edukasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan produk dan layanan perbankan syariah Indonesia. Kegiatan tersebut merupakan pusat biaya bagi perbankan syariah. Hayat (2014).

Selama ini kegiatan sosialisasi dan edukasi perbankan syariah Indonesia dilakukan melalui program 'IB Campaign' baik melalui media masa, syariah expo, maupun penyelenggaraan seminar/*workshop*. Namun, Bank Indonesia akan mengurangi peran tersebut seiring dengan pengalihan kewenangan pengaturan dan pengawasan sektor perbankan kepada OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dan perbankan syariah termasuk didalamnya. Menyikapi hal tersebut, perbankan syariah Indonesia harus meningkatkan kemandirian dalam hal formulasi program dan pembiayaan sehingga program 'IB Campaign' dapat terus berlanjut.

Tantangan lain yang menjadi tantangan dalam jangka panjang yaitu mengenai perlunya kerangka hukum yang mampu menyelesaikan permasalahan keuangan syariah secara komprehensif. Diperlukan aturan hukum ekonomi/keuangan islam yang disepakati bersama untuk dijadikan rujukan dan disahkan oleh negara. Kerangka hukum tersebut perlu dilakukan penyempurnaan mencakup skala global untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin terjadi dalam transaksi keuangan syariah antar negara ASEAN yang juga termasuk perbankan syariah didalamnya. Penyempurnaan kerangka hukum diharapkan akan dapat memberikan suasana yang kondusif bagi pengembangan perbankan syariah Indonesia baik secara nasional maupun global terutama dalam menghadapi pasar global Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) perbankan syariah Indonesia juga dihadapkan pada tantangan mengenai perlunya kodifikasi produk dan standar regulasi yang bersifat nasional dan global. Hal tersebut sangat penting dikarenakan adanya perbedaan dalam pengembangan produk perbankan syariah di beberapa negara. Adanya perbedaan tersebut akan dapat memicu timbulnya resiko apabila terkait dengan transaksi keuangan. Untuk itu, diperlukan penyesuaian produk secara nasional terlebih secara global untuk menghadapi

persaingan pasar global Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang melibatkan negara-negara ASEAN. Penyelarasan tersebut diperlukan agar keuangan Islam yang salah satunya termasuk perbankan syariah dapat berkembang di berbagai negara dan tidak saling memproteksi karena perbedaan mazhab. Adanya lembaga internasional seperti, *International Financial Services Board* (IFSB) dan *International Islamic Financial Market* (IIFM) yang menghadirkan regulasi yang dapat dijadikan pedoman secara global sangat perlu dikembangkan untuk menciptakan peraturan secara internasional untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Berbagai tantangan di atas harus dapat diselesaikan untuk pengembangan perbankan syariah Indonesia terus dapat meningkatkan kualitas, terlebih dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang dapat dijadikan untuk bekerjasama antar bank syariah di ASEAN sehingga MEA tidak sebagai persaingan antara bank syariah di ASEAN namun dapat menjadikan persatuan yang akan menjadi bank yang besar di ASEAN walaupun memiliki perbankan syariah dengan karakteristik yang berbeda-beda.

3.2 Peluang Bank syariah menghadapi MEA

Pertumbuhan industri perbankan syariah Indonesia diperkirakan akan mencapai 20% pada tahun 2015, dan pada tahun tersebut Indonesia akan menghadapi persaingan pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 (Takidah, 2014). Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 akan berdampak terciptanya pasar bebas dibidang permodalan, barang dan jasa, investasi serta tenaga kerja. Tujuan dibentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) untuk meningkatkan stabilitas perekonomian kawasan ASEAN, yang pada nantinya diharapkan akan dapat mampu menyelesaikan permasalahan ekonomi antar negara ASEAN (Puja, 2012).

Perbankan syariah Indonesia dapat dijadikan kekuatan negara Indonesia dalam menghadapi persaingan global Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Perbankan syariah Indonesia yang terbukti mampu bertahan dari krisis ekonomi global tahun 2008 telah terbukti memiliki kinerja yang baik dan diharapkan mampu menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Faktor yang telah menyelamatkan perbankan syariah Indonesia menghadapi krisis ekonomi global dikarenakan pembiayaan perbankan syariah Indonesia yang masih lebih diarahkan kepada aktivitas perekonomian domestik, sehingga belum memiliki tingkat integrasi yang tinggi dengan sistem keuangan global serta belum memiliki tingkat transaksi yang tinggi

Indonesia sebagai salah satu negara yang menjadi peserta Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) telah memiliki pasar perekonomian syariah yang potensial. Hal tersebut dibuktikan dengan pertumbuhan kelembagaan perbankan syariah Indonesia yang terus mengalami peningkatan. Peningkatan kelembagaan syariah mencakup pada peningkatan BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah) dan BPRS.

Industri keuangan syariah selama tahun 2013 masih tetap menunjukkan kinerja yang cukup baik, dan hal ini menjadi peluang besar bagi perbankan syariah Indonesia untuk turut bersaing di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Walaupun sepanjang tahun 2013 dampak krisis keuangan dan perlambatan perekonomian global masih cenderung berpengaruh terhadap laju pertumbuhan perekonomian Indonesia dan berbagai negara, namun perbankan syariah Indonesia masih menunjukkan kinerja yang cukup positif. Hal tersebut seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Pertumbuhan Aset dan Keuangan Perbankan Syariah Indonesia

Keuangan BUS dan UUS	dalam Jutaan Rupiah					
	2008	2009	2010	2011	2012	
Total Aset	49.555.122	66.089.967	97.519.337	145.466.672	195.017.755	242.276.169
Pembiayaan yang Diberikan	38.198.724	46.886.354	68.181.050	102.655.215	147.505.141	184.121.933
Dana Pihak Ketiga (DPK)	36.852.148	52.271.295	76.036.387	115.414.645	147.512.319	183.534.056
Keuangan BPRS						
Aset BPRS	1.694.046	2.122.187	2.738.745	3.520.417	4.698.952	5.833.488
Pembiayaan BPRS	1.256.610	1.586.919	2.009.093	2.675.930	3.553.520	4.433.492
Dana Pihak Ketiga (DPK) BPRS	975.815	1.250.353	1.603.778	2.095.333	2.937.802	3.666.174

Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah 2013 (OJK)

Merujuk pada penelitian Alamsyah (2012) bahwa Indonesia menduduki peringkat keempat negara yang memiliki potensi dan kondusif dalam pengembangan industri keuangan syariah setelah negara Iran, Malaysia, dan Saudi Arabia. Indonesia yang mayoritas berpenduduk kaum muslim dengan jumlah terbesar di dunia akan menjadikan perbankan syariah Indonesia memiliki pangsa pasar yang luas. Hal ini tentu akan mendorong kemajuan perbankan syariah di Indonesia dalam menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dengan negara-negara ASEAN yang lainnya terutama Malaysia.

Sistem perkembangan perbankan syariah Indonesia yang lebih bertumpu pada sektor riil serta bersifat *market driven* dan dorongan *bottom up*, tanpa dikendalikan oleh pemerintah (Hayat, Hal tersebut menjadi keunggulan tersendiri dalam menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) untuk lebih mudah berkembang. Perbankan syariah Indonesia dapat mengembangkan kinerjanya sendiri tanpa menunggu pemerintah. Berbeda halnya dengan perkembangan perbankan syariah di negara Iran, Malaysia, dan Arab Saudi, yang lebih bertumpu pada sektor keuangan dengan dukungan dan campur tangan pemerintah yang sangat kuat, sehingga untuk dapat berkembang mereka harus menunggu peran pemerintah.

Peluang lain yang dimiliki perbankan syariah Indonesia yaitu dalam hal kewenangan mengeluarkan fatwa. Fatwa keuangan syariah di Indonesia bersifat terpusat oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan institusi yang independen, sementara di negara lain fatwa dapat dikeluarkan oleh perorangan ulama yang dapat menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat. Negara Malaysia memiliki struktur organisasi lembaga fatwa tidak berdiri sendiri secara independen namun berada di bawah Bank Negara Malaysia (BNM).

Peluang besar yang dapat menjadikan perbankan syariah Indonesia dapat berkembang di era Masyarakat

Ekonomi ASEAN (MEA) yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi yang masih tinggi yang dapat memberikan ruang bagi perkembangan perbankan syariah Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, keadaan ekonomi Asia yang menunjukkan ketahannya dengan tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang kuat, tingkat inflasi yang rendah, serta sistem keuangan yang sehat yang menunjukkan pertumbuhan perbankan syariah Indonesia akan mampu bersaing dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

4.Simpulan

Berbagai peluang dan tantangan diatas menunjukkan perbankan syariah di ASEAN mesti bekerjasama dan bersatu bukan menjadi pesaing antar bank syariah dengan upaya keras dari perbankan syariah Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Mengingat adanya peluang besar untuk mengembangkan perbankan syariah Indonesia dan juga untuk menghadapi berbagai tantangan atas terlaksananya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), maka perbankan syariah Indonesia harus mampu menjembati semua perbankan di ASEAN untuk dapat bekerjasama dan bersatu dalam menjalankan berbagai strategi pengembangan. Untuk itu, peran semua pihak dalam pengembangan perbankan syariah Indonesia diharapkan mampu menjadikan perbankan syariah Indonesia memiliki prospek yang baik, semakin berkualitas dan mampu bekerjasama dengan negara-negara ASEAN dalam menghadapi ekonomi pasar global Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.

Daftar Pustaka

- Alam, Syamsul.(2015). Penulisan Artikel Ilmiah untuk Publikasi Ilmiah Melalui Jurnal. *Artikel E-Buletin*. ISSN April, hal.355-389.
- Alamsyah, Halim. (2012). Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan dalam Menyongsong MEA 2015. Makalah disampaikan pada Ceramah Ilmiah Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Milad ke-18 IAEI, (13 April 2012).
- Dhika Putri Awwallin. (2014). Peluang, tantangan dan prospek perbankan syariah Indonesia dalam menghadapi persaingan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) 2015, Universitas Negeri Surabaya. www.google.com
- Hayat. (2014). Globalisasi Perbankan Syariah: Tinjauan Teoritis dan Praktis dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Hunafa: Jurnal Studia Islamika Vol. 11, No. 2, Desember 2014: 293-314
- International Monetary Fund (IMF) Banking Report 2013-2014.
- Maris Strategies & the Banker (2010), Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries, Organization Of Islamic Cooperation Sesric.

Otoritas Jasa Keuangan. (2013). Laporan Perkembangan Keuangan Syariah.

Puja, I Gusti Agung Wesaka . (2012). *ASEAN Selayang Pandang Edisi Ke-20*. Jakarta

Takidah, Erika. 2014. Strategi Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. *Seminar dan Konferensi Nasional FE UNJ*, 22-23 April.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Edisi Ke-20. Bandung: Alfabeta

Takidah, Erika. (2014). Strategi Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. *Seminar dan Konferensi Nasional FE UNJ*, 22-23 April.

Tedjasuksmana, Budianto. (2014). Potret UMKM Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. *Jurnal UKWMS*. ISSN No: 1978-6522.

World Islamic Banking Competitives Report 2013- 2014.